

SURVEY PERILAKU PEMILIH PILKADA BANJAR 2008

Oleh : **Edi Kusmayadi¹, Akhmad Satori², Mohammad Ali Andrias³,
Subhan Agung⁴, Taufik Nurohman⁵, Wiwi Widiastuti⁶,**

1. Alumni Magister Administrasi Negara STIA Tasikmalaya
2. Alumni Magister Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Alumni Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed Purwokerto²⁻⁶
4. Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UNSIL¹, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Politik UNSIL¹⁻⁶

ABSTRACT

Competition of election mayor of banjar city very tight and the results is no easy to guess. There are too many variable who affected of the candidates victory, which is, political party sponsored, solid campaign team, big budget, campaign central messages, campaign method, candidate image and constituent treatment can become an significant variable to get the victory. Scientific method who accurate and trusted to understood the voters with make a survey. Survey can show strength and weakness the candidates in front of the voters..

Specifically, the information who get from survey are, first popularization measure, second, election level possibility, third, votes reason mapping, forth, significant issued identification, Fifth, campaign strategy identification. Concerned with that, behavior voters survey would become considerable value political mapping for the candidate to get a victory.

Research result indicate people animo about election mayor of banjar city are very huge. People aspiration include individual characteristic figure, which is, integrity, economic capability, drummed up region commitment, leadership provisionally put a finger on a big attention accordingly the heftiest candidate mayor of banjar city hold on incumbent mayor dr. Herman Sutrisno.

Key word : Survei, incumbent, popularity, electability

ABSTRAK

Kompetisi pemilihan kepala daerah (pilkada) sangat ketat dan tidak mudah ditebak hasilnya. Banyak variabel yang berpengaruh terhadap kemenangan kandidat yakni, dukungan partai, tim kampanye yang solid, besaran budget, pesan sentral kampanye, metode kampanye, citra kandidat, perawatan konstituen merupakan variabel penting untuk meraih kemenangan. Metode ilmiah yang akurat dan terpercaya untuk dapat memahami pemilih adalah dengan melakukan survei. Survei dapat menunjukkan kekuatan riil dan kelemahan kandidat dimata pemilih.

Secara spesifik, beberapa informasi yang dapat diperoleh melalui survei adalah: pertama, mengukur popularitas. Kedua, mengukur kemungkinan tingkat keterpilihannya. Ketiga, memetakan alasan memilih. Keempat, identifikasi isu-isu penting. Kelima, mendeteksi medium dan strategi kampanye. Terkait dengan hal tersebut, survei perilaku pemilih akan menjadi peta politik berharga yang dapat memandu kandidat menuju kemenangan.

¹ Angkatan 2003 lulus tahun 2005
Survey Perilaku Pemilih Pilkada Banjar 2008 (Edi Kusmayadi Akhmad Satori, Mohammad Ali Andrias Subhan Agung, Taufik Nurohman, Wiwi Widiastuti)

Hasil penelitian menunjukkan animo masyarakat terhadap pilkada sangat besar. Aspirasi masyarakat meliputi karakteristik individual figur, yaitu integritas, kemampuan ekonomi, komitmen memajukan daerah dan kapabilitas kepemimpinan selain yang lebih penting juga popularitas calon. Pejabat incumbent sementara ini mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Berdasarkan survey yang dilakukan maka untuk sementara kandidat terkuat calon Walikota Banjar di pegang oleh pejabat incumbent **dr. Herman Sutrisno**.

Kata Kunci : Survei, incumbent, popularitas, elektabilitas.

A. PENDAHULUAN

Kompetisi memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) sangat ketat dan tidak mudah ditebak hasilnya. Hal ini karena banyak variabel bekerja yang berpengaruh terhadap kemenangan kandidat. Dukungan partai, tim kampanye yang solid, besaran *budget* (dana), pesan sentral kampanye, metode kampanye, citra kandidat, perawatan konstituen adalah beberapa variabel penting untuk meraih kemenangan.

Meskipun demikian, satu kepastian dalam pilkada adalah pemilih menjadi faktor penting kemenangan seorang kandidat. Tidak peduli apakah kandidat memiliki dukungan partai yang kuat atau *budget* tidak terbatas tetapi apabila pemilih tidak berkenan maka semua keunggulan yang dimiliki menjadi tidak berguna. Oleh karena itu pemilih sebagai penentu kemenangan perlu dipahami.

Satu metode ilmiah yang akurat dan terpercaya untuk dapat memahami pemilih adalah dengan melakukan survei. Melalui survei karakteristik pemilih, keinginan dan *preferensi* pemilih dapat dideteksi. Survei dapat menunjukkan kekuatan riil dan kelemahan kandidat dimata pemilih. Saat ini survei menempati posisi penting dalam politik Indonesia. Dalam berbagai diskusi hasil survei sering dikutip untuk memperkuat argumentasi ketika mendiskusikan masalah publik. Pada kasus-kasus tertentu hasil survei juga digunakan untuk mengambil dan mengubah sebuah kebijakan. Pada dimensi yang lain hasil survei bahkan digunakan sebagai instrumen politik untuk mengambil langkah politik tertentu sampai pada digunakan untuk rekayasa politik.

Secara spesifik, beberapa informasi yang dapat diperoleh melalui survei adalah: *pertama*, mengukur popularitas. Dalam pemilihan secara langsung, popularitas adalah modal dasar yang harus dipunyai oleh seorang kandidat. Survei berguna untuk mengukur sejauh mana tingkat pengenalan publik terhadap kandidat dan berapa banyak pemilih yang tidak mengenal kandidat. Dikelompok sosial atau wilayah mana kandidat populer dan dikelompok sosial

atau wilayah mana dia tidak populer. Bagaimana perbandingan popularitas kandidat dibandingkan dengan kandidat lain, dan sebagainya. *Kedua*, mengukur kemungkinan tingkat keterpilihannya (*electability*). Survei dapat mengetahui seberapa besar dukungan publik terhadap kandidat. Di kelompok sosial atau daerah mana kandidat didukung, di kelompok sosial atau daerah mana kandidat tidak mendapat dukungan. Bagaimana perbandingan *electability* kandidat dibandingkan kandidat lainnya.

Ketiga, memetakan alasan memilih. Faktor-faktor apa saja yang menentukan pilihan seorang pemilih. Faktor apa yang paling berpengaruh? Apakah faktor itu bersifat permanen atau dapat berubah. Kalau bisa berubah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut, dan sebagainya.

Keempat, identifikasi isu-isu penting (*issues mapping*). Lewat survei, kandidat dapat mengetahui isu-isu yang dipandang penting oleh pemilih dan isu-isu yang tidak dianggap penting. Program apa yang diinginkan oleh pemilih? Bagaimana perbandingan penilaian atas isu penting dan program yang harus dijalankan dari berbagai kelompok masyarakat, dan sebagainya.

Kelima, mendeteksi medium dan strategi kampanye. Survei bisa mendeteksi media (suratkabar, radio, televisi) apa yang paling banyak diakses oleh pemilih. Sejauh mana pemilih menyukai medium kampanye yang lain seperti pertandingan olahraga, pertemuan agama, atau pertemuan adat. Medium luar ruang apa yang paling banyak diakses oleh pemilih, apakah spanduk, baliho, stiker, dan sebagainya. Informasi ini penting sebagai bahan dalam menyusun strategi kampanye.

Manfaat umum yang dapat diperoleh dengan survei adalah kandidat dapat merancang suatu strategi kampanye yang efektif dan tepat sasaran. *Pertama*, kandidat dapat memetakan kelompok pemilih yang menjadi basis pendukung, kelompok pemilih yang bisa didekati dan ditingkatkan suaranya, dan kelompok pemilih yang imun yang tidak perlu didekati.

Kedua, kandidat dapat mengangkat tema isu yang tepat sebagai platform kampanye, baik tema umum maupun tema khusus berdasarkan kelompok sosial pemilih. Terakhir, kandidat dapat merancang medium yang efektif dalam rangka mempengaruhi pemilih.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kota Banjar dalam waktu yang tidak lama lagi akan menyelenggarakan *event* pilkada untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota. Terkait dengan hal tersebut, bagi para kandidat yang beminat

untuk ikut berlaga dalam pilkada Kota Banjar, adanya survei perilaku pemilih akan menjadi peta politik berharga yang dapat memandu kandidat menuju kemenangan. Oleh karena itu, survei menjadi penting untuk dilakukan.

B. METODE SURVEI

Dilihat dari tujuan survei merupakan survei deskriptif. Survei berusaha menggambarkan tingkat popularitas kandidat dan penerimaan pemilih terhadap kandidat. Survei juga menggambarkan karakteristik pemilih, keinginan dan preferensi pemilih. Dilihat dari waktu merupakan survei *snapshot*, yaitu dilakukan hanya satu kali saja sebelum pemilihan. Kandidat dapat memilih waktu pelaksanaan survei. Semakin jauh jarak waktu pelaksanaan survei dengan jadwal pemilihan akan semakin baik karena hasil survei dapat digunakan untuk merancang pilihan strategi pemenangan pilkada.

Populasi sasaran dari survei ini adalah semua penduduk yang sudah mempunyai hak pilih (berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah) pada pilkada. Apabila data tersebut sulit diperoleh maka akan menggunakan data pemilih pada Pilkada Gubernur Jawa Barat 2008. Diperkirakan pergeseran jumlah pemilih tidak jauh berbeda.

Penarikan sampel dilakukan dengan prinsip probabilitas yaitu Multistage Random Sampling (MRS). Oleh lembaga-lembaga survei terkenal, teknik tersebut dianggap sebagai teknik paling canggih untuk merepresentasikan populasi dibandingkan teknik penarikan sampel lainnya. Teknik ini memungkinkan setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih atau tidak dipilih menjadi responden, sehingga pengukuran pendapat dapat dilakukan dengan hanya melibatkan sedikit responden.

Fase pertama yang akan dilakukan adalah populasi kota distratifikasi atas dasar populasi di masing-masing kecamatan di seluruh kota sehingga diperoleh sampel dalam jumlah proporsional di masing-masing kecamatan. Semua kecamatan akan terjaring dalam survei ini. Strata kedua adalah pembagian atas dasar wilayah tinggal, pedesaan atau kota, dan strata atas perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dan tingkat usia : muda (17-40 tahun) – tua (41 tahun ke atas). Fase kedua adalah menetapkan desa/kelurahan sebagai Primary Sampling Unit (PSU), dan karena itu random sistematis dilakukan terhadap desa/kelurahan di masing-masing kecamatan sesuai dengan proporsi populasi. Di masing-masing desa/kelurahan terpilih kemudian didaftar nama-nama Rukun Tetangga kemudian dipilih beberapa RT secara random. Di masing-masing RT

terpilih kemudian didaftar Kartu Keluarga (KK), dan kemudian dipilih keluarga secara random. Anggota keluarga yang telah memiliki hak pilih kemudian dijadikan responden.

Data akan diperoleh dengan mendatangi langsung responden kemudian menyebarkan kuesioner. Kuesioner pertama adalah kuesioner terbatas berupa kuesioner terbuka untuk mengumpulkan data awal (pre-survei). Kuesioner kedua adalah kuesioner utama untuk mengetahui perilaku memilih para responden. Kuesioner pre-survei bersifat terbuka dan kuesioner utama bersifat tertutup.

Setelah data terkumpul akan dilakukan reduksi data, kasifikasi data dan pengorganisasian data. Data diolah menggunakan tabulasi silang yang diperkuat dengan analisis deskriptif. Hasil dari analisis berupa laporan penelitian.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Demokrasi dan Pilkada langsung

Reformasi dirasakan membawa berkah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Alam reformasi meniscayakan sistem demokrasi dalam praktek kehidupan politik. Permasalahannya apakah iklim reformasi berdampak dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat atau sebaliknya, justru menjauhkan kepentingan rakyat dari para pemimpinnya. Pertanyaan ini yang kemudian mengemuka saat terlaksanakannya pemilihan kepala daerah langsung (pilkadal), sebuah pemilihan langsung kepala daerah secara demokratis, yang merupakan berkah dari reformasi. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang di praktekan kali pertama mulai tanggal 1 Juni 2005. merupakan hasil turunan dari pelaksanaan pemilihan presiden langsung tahun 2004 yang telah berjalan dengan baik. Pada hakekatnya, Pilkada di definisikan sebagai salah satu jenis partisipasi rakyat dalam berkontribusi bagi perkembangan daerah. Partisipasi politik rakyat merupakan salah satu syarat bagi berkembangnya iklim demokrasi yang kondusif, semakin tinggi kualitas partisipasi politik suatu negara, maka semakin tinggi pula kualitas demokrasi negara tersebut.

1.1. Demokrasi

Demokrasi yang diungkapkan *Joseph Schumpeter* bahwa demokrasi merupakan mekanisme untuk memilih pemimpin politik, warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang sedang bersaing meraih suara untuk melegitimasi kepemimpinan mereka. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin politik mereka pada masa

pemilihan inilah yang disebut demokrasi. Hal tersebut didukung dengan adanya ungkapan *Joseph Schumpeter* bahwa metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara (G. Sorensen, 2003:14).

1.2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung

Pilkada langsung dapat diartikan secara positif maupun negatif. Dalam pengertian positif, pilkada langsung sebagai sarana demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai infrastruktur politik untuk memilih Kepala Daerahnya secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. Meskipun rakyat tidak terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan secara langsung, akan tetapi mereka dapat melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan yang sudah mendapatkan amanat langsung dari rakyat. Kemudian dalam pengertian negatif, Pilkada langsung akan mencerminkan penafsiran sepihak atas manfaat dan proses Pilkada. Proses ini dianggap sebagai pesta demokrasi rakyat, dimana seakan-akan rakyat berhak untuk berbuat apa saja, termasuk tindakan anarki yang dilakukan secara mandiri maupun mobilisasi.(Amirudin, dan A. Zaini Bisri. 2005 : 3).

Mekanisme pilkada langsung dilaksanakan dengan beberapa alasan penting, selain argumen sebagai konsekuensi atas diselenggarakannya pemilu yang juga diselenggarakan secara langsung baik pemilu legislatif maupun presiden. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab dalam diselenggarakannya pilkada langsung, antara lain : **(a)** Prasyarat penting dalam demokrasi adalah adanya kompetisi politik yang damai, sehingga pilkada menjadi mekanisme pertarungan politik secara damai dalam rangka pengisian posisi jabatan politik. **(b)** Secara legal formal, pelaksanaan pilkada langsung adalah amanat langsung dari konstitusi UUD 1945 pasal 18 ayat (4), yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan secara teknis dijabarkan lagi dalam PP No. 6 Tahun 2005. **(c)** Model pemilihan langsung dalam pilkada merupakan solusi praktis untuk mengatasi berbagai persoalan rekrutmen politik dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD yang seringkali diwarnai dengan *money politics* (politik uang). **(d)** Dengan adanya pilkada adalah sebuah pembelajaran politik bagi rakyat untuk meningkatkan kualitas politiknya. Perlunya mekanisme pilkada secara langsung, adalah didasari oleh asumsi

bahwa sudah saatnya rakyat diberi kesempatan yang luas untuk menggunakan kedaulatannya. (Bambang Purwoko. 2005 : 7-8)

Semangat yang terkandung dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa pelaksanaan pilkada langsung pada hakekatnya tidak hanya untuk tujuan mengoptimalkan demokratisasi daerah melainkan juga merupakan perwujudan dari otonomi yang seluas-luasnya. Berkaitan dengan masyarakat yang menentukan dan memilih kepala daerahnya, maka tinggi rendahnya kualitas seorang kepala daerah, rakyat pula yang turut menentukan (Amirudin, dan A. Zaini Bisri. 2005 : 14). Berdasarkan pasal 56, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda dinyatakan bahwa "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon yang dimaksud adalah diajukan oleh partai politik maupun gabungan partai politik".

Akan tetapi Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 59 ayat (1) dalam UU No. 32 Tahun 2004, dan penjelasan dari pasal dan ayat tersebut diganti sehingga pasangan calon tidak harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai 15% kursi di DPRD, tetapi dapat pula diusulkan oleh gabungan partai-partai kecil yang akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD mencapai 15%. Hal tersebut tentunya sangat berarti karena dengan adanya peraturan tersebut memungkinkan calon independen memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk masuk dalam bursa pencalonan melalui partai-partai kecil tersebut. Partai politik maupun gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik maupun gabungan partai politik lain.

Berdasarkan pasal 65, UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Pilkada dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. Adapun masa persiapan yang dimaksud meliputi : **(a)** Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan, **(b)** Pemberitahuan DPRD kepada KPUD tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, **(c)** Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkada, **(d)** Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS, **(e)** Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

Dalam pelaksanaan pilkada langsung tersebut baik dalam tahapan persiapan ataupun tahap pelaksanaan akan diatur oleh KPUD, dan selanjutnya akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam PP No. 6 Tahun 2005 tersebut dijelaskan bahwa pasangan calon berhak untuk melakukan kampanye sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan Pilkada dengan jadwal yang ditentukan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon. Dalam kampanye tersebut rakyat diberi kebebasan untuk menghadiri kampanye. Salah satu bagian dari kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon dan apabila pasangan calon tersebut kelak terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah maka visi, misi, dan program tersebut dijadikan sebagai dokumen resmi daerah.

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon yang terpilih. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah, pasangan calon yang memperoleh suara terbesar akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila perolehan 25% suara tersebut diperoleh lebih dari satu pasangan calon, maka penentuan pasangan calon akan dipilih berdasarkan wilayah perolehan yang lebih luas. Kemudian apabila tidak ada yang mencapai 25% dari jumlah perolehan suara sah, maka akan dilakukan proses pemilihan putaran kedua dengan mengikutsertakan pasangan calon yang memperoleh suara yang terbanyak pertama dan kedua dengan mekanisme yang sama.

Dengan adanya konsep tentang pilkada langsung yang secara rinci termuat dalam UU No. 32 Tahun 2004, hal tersebut akan menjadi acuan dasar dalam penelitian ini, yaitu mengenai hal-hal yang sah dan dapat dilakukan oleh calon kepala daerah dalam upaya pemenangan pilkada langsung yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Berkaitan dengan kajian tentang Pilkada langsung dalam penelitian ini, diperlukan pula konsep tentang bagaimana Kepala Daerah yang seharusnya serta yang pantas untuk memimpin daerah pada masa otonomi daerah seperti sekarang ini. Artinya bahwa dalam pilkada langsung akan tetap memperhatikan bagaimana kepemimpinan calon kepala daerah tersebut untuk mempengaruhi pilihan dari para pemilih.

2. *Incumbent*

Keberhasilan *incumbent* melanggengkan kekuasaannya, secara faktual merupakan catatan tersendiri yang mengukir sejarah dalam belantika pemilihan kepala daerah secara langsung. Begitu perkasanya *incumbent* bersaing dengan *new comer* (pendatang baru) dalam kompetisi Pilkada. Berikut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan *incumbent* seperti apa yang diungkapkan oleh Irham Taufik Umri, yaitu :

a. Popularitas

Salah satu indikator pemimpin mendapat dukungan rakyat adalah *popularity* (populer), tidak dapat dipungkiri *incumbent* memperoleh keuntungan sangat besar untuk meraih popularitas, karena selama lima tahun ia memegang kendali pemerintahan, menata pembangunan serta memfasilitasi pelayanan publik. Implikasinya *incumbent* dikenal luas oleh rakyatnya. Kepopuleran *incumbent* bertambah besar, jika program yang didesainnya benar-benar merupakan kebutuhan riil dan hasilnya benar-benar dirasakan serta dinikmati masyarakat.

b. Penguasaan Medan

Figur *incumbent* tentunya sudah menguasai secara jelas suatu kondisi daerah. Seperti halnya dalam menghadapi Pilkada, *incumbent* sudah punya persiapan yang sudah cukup maksimal. Sebaliknya lawan-lawan *incumbent*, akan ketinggalan jauh dari *incumbent* dalam kompetisi Pilkada di daerah tersebut. Demikian pula dalam menggalang dukungan, *incumbent* tidak begitu perlu bekerja keras, karena sudah mengenal secara komprehensif individu dan elemen masyarakat yang akan diajaknya untuk berhimpun mendukungnya.

c. Komunikasi

Indikator lain yang tak kalah pentingnya bagi kejayaan *incumbent* adalah faktor *direct communication* (komunikasi langsung) dengan publik. Pada hakekatnya komunikasi bertujuan untuk membangun kebersamaan. *Incumbent* jauh-jauh hari (5 tahun) sudah melakukan komunikasi dengan publiknya. Hampir setiap waktu, komunikasi terjadi baik secara individual, kelompok maupun dengan massa yang lebih besar. Komunikasi langsung yang dilakukan makin melekat dan meraih simpati publik, bila terjalin *double way traffic communication* (komunikasi dua arah/ timbal balik) artinya *incumbent* bukan hanya menjelaskan program pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya akan tetapi ia juga

menerapkan asas responsifitas (daya tanggap) yaitu menerima umpan balik (*feed back*) berupa aspirasi, keluhan, saran, masukan, termasuk juga kritik.

d. Kepercayaan Rakyat

Figur *incumbent* yang melanggengkan kekuasaannya kembali, merupakan bukti nyata, rakyat yakin dan percaya atas kemampuan mereka. Walaupun berbagai macam serangan yang ditujukan untuk merusak kredibilitasnya, masyarakat secara langsung tetap menjatuhkan pilihannya di bilik suara tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun. Pilkada yang bertujuan untuk pembelajaran berdemokrasi, telah dimanfaatkan rakyat dengan hati nurani dan rasional. Banyaknya *incumbent* terpilih kembali di pucuk pimpinan pemerintahan memberikan makna kapabilitas, akseptabilitas, kredibilitas, dan integrasi.

Berkaitan dengan kajian Pilkada langsung yang menitikberatkan pada analisis kemenangan *incumbent* dalam Pilkada langsung yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka preferensi politik dalam memilih figur seorang kandidat dalam Pilkada juga dipengaruhi bagaimana kinerja figur yang bersangkutan akan menjadi salah satu dasar yang memperkuat kemenangan figur *incumbent*. Pemilih akan cenderung memilih figur baru (*non-incumbent*) jika tidak puas dengan kinerja *incumbent* selama menjabat. Sebaliknya pemilih lebih suka memilih *incumbent* jika sudah cukup puas dengan kinerja *incumbent* selama menjabat. Situasi di atas membuka kemungkinan bagi terpilihnya kembali orang yang sedang menjabat (*incumbent*) terpilih kembali sebagai kepala daerah. Hal tersebut dikarenakan terdapat korelasi antara pilihan masyarakat pemilih dengan kandidat pejabat kepala daerah, terutama ketika orang tersebut dinilai berhasil memimpin daerahnya.

3. Partai Politik

Keberadaan partai politik adalah sebuah keharusan bagi kehidupan politik modern yang demokratis. Pengertian dan fungsi partai politik juga sangat beragam. Partai politik dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih rakyat sehingga partai politik dapat mengontrol serta mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Partai politik juga merupakan suatu wadah atau sarana bagi setiap masyarakat guna berpartisipasi dalam bidang politik. Berikut terdapat berbagai pengertian partai politik menurut beberapa ahli :

- a. *Carl J. Friedrich*, dalam tulisannya yang berjudul *Constitutional Government and Democracy : Theory and Practice in Europe and America*,

mendefinisikan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya dan berdasarkan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idii maupun materiil (Soebiantoro, dkk. 2000 : 83-84).

- b. *Sigmund Neuman*, dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Parties*, memberikan definisi bahwa partai politik adalah organisasi dari para aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (Soebiantoro, dkk. 2000 : 84).

Dengan demikian konsep partai politik yang akan dijadikan acuan dasar dalam mengkaji fenomena dalam penelitian ini adalah partai politik merupakan sekelompok masyarakat yang terorganisasi dengan anggota yang mempunyai tujuan yang sama, organisasi tersebut berusaha memperoleh dukungan rakyat, sedangkan yang menjadi tujuannya adalah memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik sehingga dapat melaksanakan kebijaksanaan organisasinya dengan jalan menempatkan anggotanya pada jabatan pemerintahan. Hal tersebut dilakukan dengan cara konstitusional, yaitu melalui Pemilu. Di dalam masyarakat modern, partai politik menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik yang tentunya memiliki fungsi-fungsi tertentu. Partai politik sebagai suatu asosiasi politik yang mengaktifkan, memobilisasi masyarakat, mewakili kepentingan tertentu dan melakukan pengkaderan, menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara sah dan damai hal tersebut adalah keharusan bagi sebuah partai politik (Koirudin, 2004 : 68).

Terdapat berbagai pendapat yang mengemukakan tentang fungsi-fungsi partai politik. Menurut *Roy C. Macridis*, fungsi partai politik adalah sebagai representasi, melakukan artikulasi kepentingan, agregasi, transformasi dari proses *input* menjadi *output*, rekrutmen dan pemilihan pemimpin, pertimbangan perumusan kebijakan publik, serta melakukan kontrol terhadap pemerintah (Koirudin. 2000 : 86). Berikut beberapa fungsi partai politik : **Partai politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan**. Artikulasi merupakan suatu proses penerimaan tuntutan berbagai kebutuhan dan kepentingan melalui wakil kelompok mereka sehingga kepentingan tersebut dapat terlindungi. Sedangkan agregasi merupakan cara bagaimana tuntutan yang dilancarkan oleh

kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif dalam pembuatan kebijakan publik. **Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.** Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota kelompok untuk mewakili dalam jabatan politik. Sehingga dengan demikian partai politik seharusnya dapat menghasilkan pelaku politik yang berkualitas dimasyarakat dengan menyediakan kader-kader yang berkualitas. Dalam hal ini partai politik juga turut menampung masyarakat yang aktif dalam politik untuk bergabung, sehingga partai politik juga turut serta memperluas partisipasi politik ditengah masyarakat.

Czudnowski (dalam Koirudin, 2004 : 101-102) mengemukakan beberapa hal yang menjadi faktor untuk menentukan apakah seseorang dapat terpilih atau tidak untuk menduduki jabatan publik, antara lain : **(1) Social Background**, faktor ini berhubungan dengan pengaruh sosial dan ekonomi keluarga dimana elit dibesarkan, **(2) Political Socialization**, di mana melalui sosialisasi politik seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh suatu kedudukan politik. Sehingga orang tersebut dapat menentukan apakah dia mau dan memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut, **(3) Initial Political Activity**, faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik seorang calon elit, **(4) Apprenticeship**, faktor ini menunjuk langsung pada proses “magang” dari calon elit ke calon elit yang lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit, **(5) Occupational Variables**, dalam hal ini calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal sebab elit tidak hanya dinilai dari popularitasnya saja, namun juga faktor kapasitas intelektual, **(6) Motivations**, merupakan faktor penting dengan melihat motivasi yang dimiliki calon elit tersebut untuk menduduki suatu jabatan tertentu.

Secara ringkas tujuan dari rekrutmen politik adalah terpilihnya figur pemimpin yang sesuai dengan preferensi masyarakat serta mampu menjawab berbagai tantangan yang terdapat dalam kepemimpinannya. (Solahudin Kusumanegara, 2005 :22). Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diperhatikan kriteria, antara lain : **(1) Accessibility**, artinya ada akses yang memungkinkan seluruh warga yang memenuhi persyaratan terlibat secara aktif dalam setiap tahap pemilihan. Tahapan tersebut yaitu penjaringan, pencalonan, pemilihan, dan pemutusan. **(2) Acceptability** atau *political acceptability*, yaitu figur terpilih adalah orang yang diterima oleh masyarakat sehingga mempunyai derajat legitimasi yang memadai untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, **(3) Credibility**, adalah berhubungan dengan dimensi moralitas atau etika individual

yang dianggap berpengaruh jika seseorang menduduki posisi pemimpin, (4) *Capability*, menunjukkan kemampuan seseorang untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin dalam pemerintahan. Kapabilitas seseorang dapat dilihat dari berbagai indikator seperti tingkat pendidikan, maupun latar belakang profesi., (5) *Political Accountability*, secara politis seorang calon pemimpin dapat dipercaya bahwa orang tersebut dapat melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya secara bertanggung jawab.

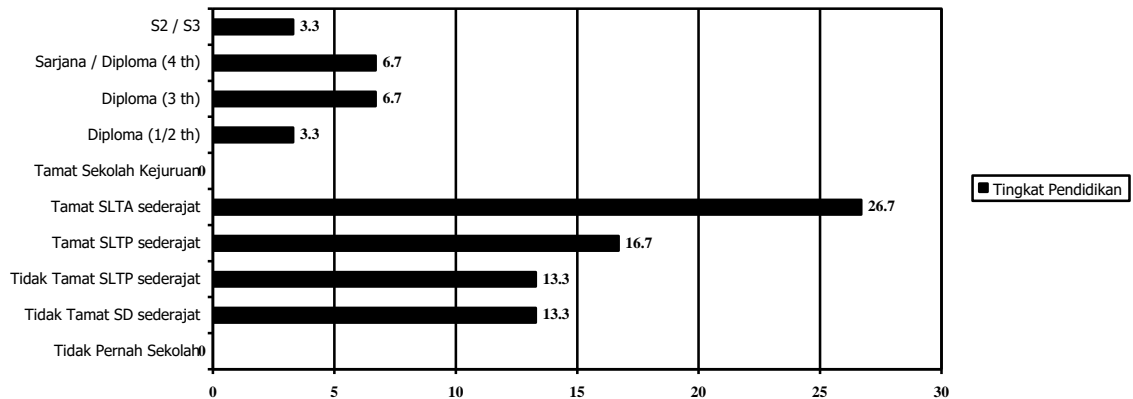
Partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik menyalurkan aspirasi yang terdapat pada masyarakat untuk negara atau sebaliknya, sehingga partai politik bertindak sebagai perantara yang menampung arus informasi. (Soebiantoro, dkk. 2000 : 94). Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat dikatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam mencapai tujuan yang diinginkan termasuk karier, juga turut dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berkomunikasi baik secara personal maupun dengan khalayak. Dalam sebuah komunikasi akan terjadi interaksi antara beberapa unsur seperti sumber, pesan, media, penerima, efek, kemudian juga umpan balik dari adanya komunikasi tersebut. (Hafied Cangara, 1998 : 62). **Partai politik sebagai sarana pembuatan kebijakan.** Fungsi sebagai pembuatan kebijakan dapat dilaksanakan oleh partai politik apabila partai politik tersebut merupakan partai yang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan dan menduduki parlemen dengan suara mayoritas. **Partai politik sebagai sarana kontrol politik.**

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Survei dan Identifikasi Data Survei

Kota Banjar merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis, dengan karakteristik penduduk yang heterogen. Survey ini menggunakan 30 responden yang tersebar di empat kecamatan di wilayah Kota Banjar, yaitu kecamatan Purwaharja, Kecamatan Langensari, Kecamatan Pataruman dan Kecamatan Banjar. Dari data hasil survey diperoleh tingkat pendidikan responden di dominasi oleh lulusan SLTA sederajat dengan 26.7 % dan lulusan SLTP sebanyak 16,7 %. Lulusan Perguruan Tinggi baik pada tingkat diploma maupun sarjana masing-masing sebanyak 6,7 % dan yang menarik adalah sebanyak 3,3 % responden merupakan lulusan dari pascasarjana, sedangkan sisanya tidak tamat SLTP.

Gambar 1. Tingkat Pendidikan Responden...(%)



Dari karakteristik tingkat pendidikan tersebut dapat kita lihat bahwa penduduk Kota Banjar dapat dikatakan sudah melek huruf artinya sebagian besar responden yang di ambil merupakan kalangan yang terdidik, dengan asumsi mempunyai *interest* (kepentingan) terhadap kemajuan Kota Banjar baik berkaitan dengan masalah perekonomian maupun masalah perpolitikan di daerahnya. Dilihat dari usia responden, responden yang diambil merupakan penduduk yang usianya di atas 17 tahun atau sudah menikah, hal ini sesuai dengan peraturan mengenai usia pemilih dalam UU pemilu 2004 pasal 68 dan pasal 69 yang telah diubah dengan Perpu Nomor 023 Tahun 2005 dan PP Nomor 17 tahun 2005, pasal 15 dan 16 bahwa syarat untuk mempunyai hak memilih dan terdaftar sebagai pemilih yaitu; (1) Warga Negara Indonesia; (2) Berumur 17 tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara; (3) Belum berumur tetapi sudah/pernah kawin; (4) Anggota TNI/POLRI yang telah menjadi status sipil atau purnatugas; (5) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya; (6) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (7) Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu penduduk; (8) terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih; dan (9) masih memenuhi syarat sebagai pemilih. Responden yang diambil menjadi sample dalam survei ini adalah responden yang minimal sudah memenuhi syarat satu sampai lima, sedangkan untuk syarat yang lainnya diabaikan dalam survei ini.

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat usia responden beragam sesuai dengan tabel di bawah ini :

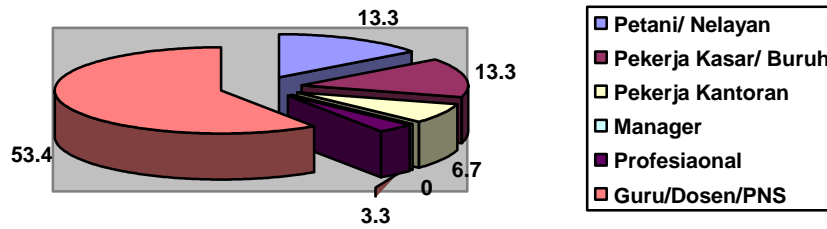
Tabel 2. Karakteristik Usia Responden

Usia Responden	Jumlah	Persentase
> 17 - < 20	5	%
20 - < 35	12	%
35 - < 50	11	%
> 50	7	%
Jumlah	30	100

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Usia dari responden yang diambil mewakili tingkat usia yang berbeda. Sebanyak 86,7 % responden memiliki usia diatas 20 tahun dan dapat dikategorikan pemilih berpengalaman, sedangkan hanya 13.3 % dari responden yang termasuk dalam kategori pemilih pemula, sebagian besar dari responden kategori pemilih pemula adalah pelajar dan lulusan SMA. Dengan asumsi bahwa di Provinsi Jawa Barat tahun 2008 telah melaksanakan pemilihan Kepala daerah tingkat Provinsi, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas responden yang diambil sudah pernah mengikuti pemilihan umum (pemilu) atau semacamnya. Hal ini penting untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat mengenai pilkada dan demokratisasi di tingkat lokal. Artinya semakin sering masyarakat mengikuti proses regulasi politik maka kondisi masyarakat tersebut ke arah demokratisasi semakin maju.

Dari karakteristik mata pencaharian responden, didominasi oleh responden yang mempunyai pekerjaan pekerja kasar /buruh, survei menunjukkan sebanyak 13.3 % responden bermata pencaharian petani, dan 13.3 % sebagai tukang becak, kuli bangunan atau pekerja. Sebanyak 53.4% dari itu berprofesi sebagai PNS baik , guru, tenaga tekhnis, maupun birokrat. 6.7 % responden bekerja di perkantoran. Hanya 6.7 % yang memiliki profesi di bidang profesiaonal, baik dokter, termasuk Insinyur dan tidak ada yang berprofesi sebagai manager. Hal ini bisa dilihat di bagan di bawah ini.

Gambar 2. Mata Pencaharian Responden



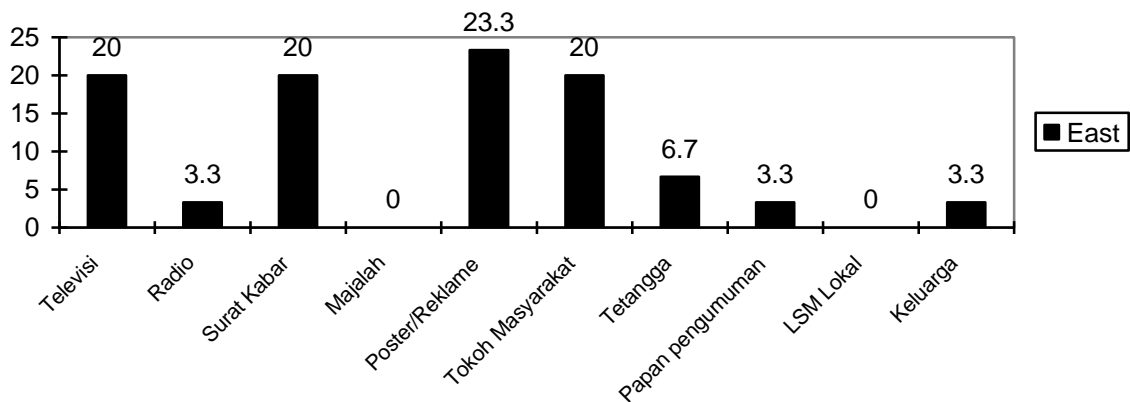
Kota Banjar merupakan wilayah baru setingkat kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Ciamis. Oleh Karena wilayah administratif Kota Banjar kecil maka banyak wilayah hasil konversi dari lahan pertanian menjadi kawasan perumahan, pusat perbelanjaan, maupun kawasan perkantoran. Pengambilan sampel responden terutama di dua kecamatan yaitu kecamatan Pataruman dan Kecamatan Banjar diambil di kawasan-kawasan industri dan pertokoan di Kota Banjar. Sebagian besar dari penduduknya merupakan kalangan menengah dan warga miskin kota kebanyakan berprofesi sebagai guru PNS ataupun Birokrat, adapun sampel yang diambil dari kecamatan Langensari maupun Purwaharja kebanyakan dari warga yang mata pencaharian petani dan perangkat desa.

Keterlibatan aktif responden dalam Pemilu dapat mempengaruhi bagaimana preferensi mereka terhadap pelaksanaan Pilkada di Kota Banjar, pengalaman mengikuti pemilihan umum dan semacamnya memunculkan persepsi yang berbeda dalam masyarakat Banjar, di satu pihak ada yang antusias terhadap Pilkada ini, namun dipihak lain sebagian masyarakat merasa keterlibatan mereka dalam pemilihan kepala daerah dianggap suatu hal yang biasa. Dari data yang diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan, beberapa temuan survei antara lain menunjukkan bahwa baru 50% warga yang tahu dalam beberapa bulan ke depan di Banjar akan ada Pemilu Walikota dan wakil Walikota yang dipilih langsung oleh warga Banjar.

Ketika responden ditanya mengenai seberapa rajin mengikuti berita pilkada, Apakah sangat rajin, cukup rajin, kurang rajin, atau sama sekali tidak mengikuti. Sedikit sekali responden yang sangat rajin mengikuti atau pun cukup rajin mengikuti, sebagian responden kurang antusias mengikuti berita seputar pilkada, bahkan 10 % dari mereka sama sekali tidak mengikuti. Hal ini bisa dipahami karena survei ini dilakukan bulan April yaitu lima bulan sebelum pelaksanaan pilkada kota Banjar dilaksanakan tanggal 26 Oktober 2008. Sedangkan sisanya 13,67% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Kemudian pada pertanyaan sumber informasi apa yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pilkada. 10 % responden mengatakan baru pertama kali mengetahui informasi Pilkada lewat survei penelitian ini, 20% mendapat informasi dari Televisi, 20% lainnya dari Surat kabar, 23,3% dari Poster / pamflet / papan reklame, 20 % informasi tersebut didapat dari Tokoh masyarakat (Perangkat desa, ulama, guru, dll), 10 % dari Tetangga dan 6,67 % dari Papan pengumuman, sedangkan tidak ada yang menjawab LSM lokal di bidang pemilihan umum atau anggota keluarga/saudara.

Gambar 3. Sumber informasi Pilkada...(%)



Masalah sosialisasi pilkada ini memang belum bisa berjalan dengan baik, ketika KPUD kota Banjar memang belum melakukan agenda sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Pilkada Banjar, bahkan ketika responden ditanyakan mengenai lembaga mana yang bertanggungjawab melaksanakan pilkada. Sebanyak 10 % memahami Pemerintah Kota Banjar yang menyelenggarakan Pilkada, sedangkan 66,67 % menjawab Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan 16 % Tidak Tahu / Tidak menjawab.

Pertanyaan semi tertutup lainnya adalah ketika ditanyakan apakah responden ikut memilih partai politik dalam pemilu legislatif tahun 2004, hasil survei menunjukkan kurang dari 50 % responden mengatakan ya, tetapi dari angka tersebut hanya 20 % yang berani menyebutkan partai politik mana yang dipilih dalam pemilu tersebut, sebagian besar menolak memberikan jawaban karena beberapa alasan, tidak mau menjawab karena rahasia, dan sebagian tidak mau menjawab tanpa alasan.

Secara umum, preferensi warga Banjar menghadapi pilkada langsung masih sangat cair. Ketika warga ditanya dengan pertanyaan terbuka (spontan), sekitar 81,9% warga belum bisa menentukan siapa tokoh yang akan dipilih menjadi Walikota Banjar. Setidaknya sampai beberapa bulan menjelang

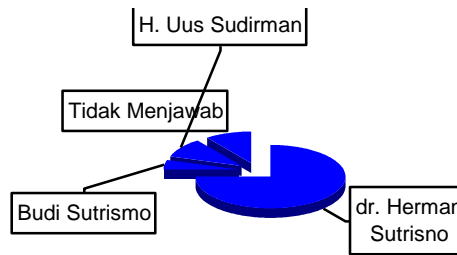
pemilihan kepala daerah. Hasil survei mencatat bahwa umumnya masyarakat Banjar belum mempunyai pilihan pasti siapa calon walikota hal ini di lihat ketika pertanyaan spontan dan terbuka umumnya mereka menolak memberikan jawaban, dengan alasan tidak mengetahui daftar-nama-nama kandidat bakal calon Walikota Banjar.

Namun ketika ditanya dengan pertanyaan semiterutup dengan menyodorkan sejumlah nama (3 nama) dan disertai kemungkinan nama lain yang mungkin spontan disebutkan responden di luar 3 nama, maka jawaban mengerucut pada nama dr. Herman sebagai *Incumbent* (Pejabat lama). Untuk sementara, dr. Herman unggul di atas kandidat-kandidat lain. Sebagai *incumbent* dr. Herman ternyata masih mempunyai kesan yang baik di mata para responden. Ketiga nama yang ditanyakan, berasal dari penelitian dan survei media, yaitu nama-nama yang memang muncul atau dimunculkan media massa di Banjar, terkait dengan kemungkinan pencalonan mereka dalam Pilkada Banjar 2008.

Keunggulan semetara dr. Herman Sutrisno sebagai *incumbent* dalam bursa pencalonan Walikota memang sudah diprediksi, secara figur dr Herman memang lebih populis di kalangan masyarakat Banjar dibanding tokoh-tokoh lain yang di prediksi akan mencalonkan diri menjadi calon atau bakal calon yang lain, selain sebagai walikota yang masih menjabat, ia juga dikenal oleh beberapa kalangan masyarakat sebagai politisi yang cukup dikenal, bahkan beberapa responden memberikan penilaian lebih terhadap kinerja pemerintahan kota Banjar saat ini.

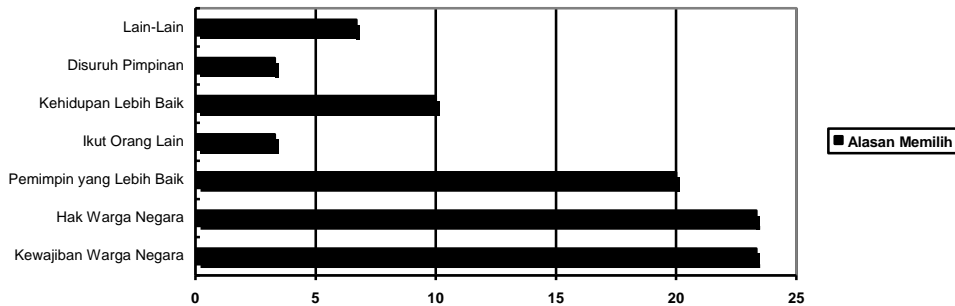
Preferensi politik masyarakat dalam memilih figur seorang kandidat dalam Pilkada juga dipengaruhi bagaimana kinerja figur yang bersangkutan. Situasi di atas membuka kemungkinan bagi terpilihnya kembali orang yang sedang menjabat (*incumbent*) terpilih kembali sebagai kepala daerah. Hal tersebut dikarenakan terdapat korelasi antara pilihan masyarakat pemilih dengan kandidat pejabat kepala daerah, terutama ketika orang tersebut dinilai berhasil memimpin daerahnya. Terkenal atau tidaknya seorang kandidat kepala daerah sangat menentukan kemenangan Pilkada. Sebab, tidak mungkin hanya mengandalkan banyaknya perolehan kursi di parlemen. Daya tarik dan popularitas figur kandidat, sering kali lebih menentukan kemenangan seorang calon kepala daerah dari pada hanya mengandalkan basis dukungan partai saja.

Gambar 4. Preferensi sementara memilih Responden...%



Untuk sementara disimpulkan, *Incumbent* unggul telak atas politisi lainnya. dr. Herman Sutrisno masih berpeluang paling besar untuk terpilih kembali menjadi Walikota Banjar. Namun, dengan waktu sekitar beberapa bulan ke depan, hasil survei ini bisa berubah bergantung pada kerja keras para kandidat. Di bawah ini adalah hasil survey yang menunjukkan beberapa alasan responden dalam memilih walikota untuk Pilihan Kepala Daerah Langsung Kota Banjar tahun 2008.

Gambar 5. Alasan Responden dalam Memilih...(%)



Partisipasi politik dalam bentuk memberikan suara dalam pemilihan umum merupakan hak sekaligus bagi warga negara, partisipasi politik juga merupakan pra syarat bagi terwujudnya demokrasi. *Robert Dahl* (G. Sorensen, 2003 : 19) mengemukakan bahwa dalam demokrasi akan mencakup tiga dimensi : *Pertama*, Kompetisi yang luas antara individu dan kelompok organisasi; *Kedua*, Kompetisi yang luas dan bermakna diantara individu dan kelompok organisasi pada posisi kekuasaan pemerintah yang efektif; *Ketiga*, Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan melalui pemilihan bebas dan teratur tanpa menyingkirkan kelompok manapun; *Keempat*, Tingkat kebebasan politik (*political rights*) dan kebebasan masyarakat (*civil liberties*) seperti kebebasan berpendapat, pers, mendirikan dan bergabung dalam sebuah organisasi, serta hak persamaan hukum. Tingkat kebebasan politik yang

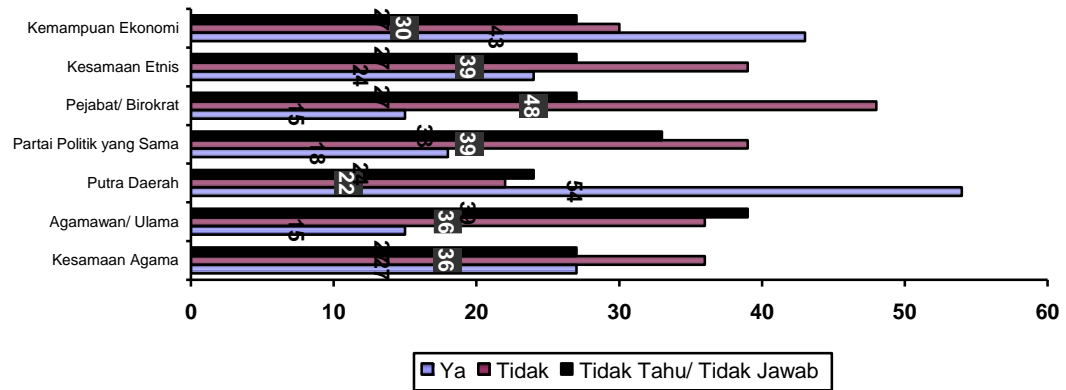
dimaksudkan disini adalah kebebasan berpendapat baik secara pribadi maupun menggunakan media massa sebagai sarana komunikasi politik.

Penelitian ini memberikan beberapa pilihan jawaban ketika responden diminta menjawab pertanyaan tentang apa alasan mereka untuk ikut memilih dalam pemilu. Survey menunjukkan terdapat perimbangan jawaban antara responden yang menjawab sebagai hak dan kewajiban warga negara yaitu sebanyak 23.3 %. Beberapa responden menilai bahwa adalah merupakan suatu Hak dan sekaligus Kewajiban dari seorang warga negara untuk memberikan suaranya dalam menentukan atau memilih di pemilu. Selain itu 20% responden mengharapkan transformasi kepemimpinan melalui mekanisme pemilihan umum dapat menghasilkan pemimpin yang lebih baik tidak hanya sekedar ikut-ikutan orang lain seperti yang di jawab sebanyak 3.3 %.

Pertanyaan terakhir yang di berikan kepada responden dalam survey ini adalah kriteria yang menjadi pertimbangan responden dalam memilih pemimpin mereka. Bagan di bawah ini menunjukkan jawaban dari hasil survey beragam. Beberapa kriteria terutama yang lebih menjadi pertimbangan responden yaitu calon yang akan menjadi pemimpin mereka berasal dari daerah mereka sendiri atau putra daerah. Sebanyak 54 % responden masih memilih calon walikota putra daerah. Selain itu juga kesamaan ekonomi menjadi pertimbangan selanjutnya sebanyak 43 % responden menganggap bahwa jika calon pemimpin mereka mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih maka di harapkan motivasi pemimpin tersebut hanya untuk mensejahterakan masyarakat dan dianggap meminimalisir praktek korupsi dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Pemilihan pertimbangan seperti itu bisa dipahami karena dalam satu dasawarsa terakhir isu Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) makin banyak terjadi baik di kalangan penyelenggaraan pemerintahan maupun di sektor lain. Pada prinsipnya bagi responden yang mewakili masyarakat Banjar, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan tetapi lebih mengutamakan kepentingan rakyat, masyarakat juga menginginkan pemimpin yang bersih dari praktek KKN. Faktor Kesamaan agama juga menjadi pertimbangan beberapa responden sebanyak 27 % memilih calon walikota yang mempunyai kesamaan agama, bahkan sebanyak 15 % menghendaki calon walikota dari kalangan tokoh Agama ataupun Ulama.

Gambar 6 . Kriteria yang Menjadi Pertimbangan dalam Memilih...(%)



D.2. PEMBAHASAN

Temuan Survey

Sistem pilkada memberikan kebebasan sepenuhnya bagi masyarakat pemilih untuk menentukan siapa kandidat kepala daerah yang akan mereka pilih. Kandidat yang akan dipilih masyarakat menjadi sangat tergantung pada popularitas (keterkenalan) yang bersangkutan di masyarakat pemilihnya. Tingkat popularitas para kandidat itu bisa diukur dengan metode ilmiah yang akurat, yakni survei popularitas bagi kandidat.

Hasil survei yang telah dijelaskan terdahulu dapat menjadi masukan amat penting untuk melihat secara riil kekuatan dan kelemahan kandidat sekaligus untuk menghadapi masa kampanye yang akan segera dilakukan. Hasil survei juga membimbing kandidat dan tim sukses tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peluang terpilih dalam Pilkada nanti. Informasi tentang pendapat, aspirasi dan harapan warga negara juga mutlak bagi karir politik dari calon pejabat-pejabat publik atau yang sedang menjabat (incumbent). Karir politik mereka juga ditentukan sejauhmana mereka responsif terhadap partisipasi warga negara tersebut.

Seberapa luas pemilih setempat mengenal kandidat. Dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, popularitas adalah modal paling dasar yang harus dipunyai oleh seorang kandidat. Survei berguna untuk ini mengukur sejauh mana tingkat pengenalan publik terhadap kandidat. Bagaimana tingkat kesukaan publik terhadap kandidat? Faktor apa saja yang disukai dan tidak disukai dari seorang kandidat? Bagaimana perbandingan popularitas seorang kandidat dibandingkan kandidat lain, kapan kandidat mendapat dukungan kuat dan kapan melemah.

Bagaimana penilaian masyarakat atas isu penting di daerah saat ini? Isu-isu apa yang dianggap penting? Bagaimana sikap mereka terhadap satu isu tertentu? Berapa banyak yang pro dan kontra? Sejauh mana pemilih cukup terlibat atau tidak dengan isu dan persoalan di daerah? Program apa yang diinginkan oleh pemilih? Kebijakan apa yang dibutuhkan oleh pemilih setempat? Tindakan apa yang menurut pemilih penting dilakukan? Prioritas apa saja yang diinginkan oleh mereka?

Salah satu kandidat utama pilkada biasanya adalah pejabat yang sedang memerintah (*incumbent*). Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab melalui survey ini. Apakah kepala daerah yang sekarang dianggap sukses atau gagal? Kalau sukses atau gagal, apa sebabnya? Apakah pemilih puas atau tidak puas dengan berbagai kebijakan pembangunan yang telah dibuat? Mana kebijakan yang pemilih ingin teruskan atau hentikan? Pendapat publik mengenai kebijakan pembangunan ini diperlukan untuk mengambil langkah yang tepat ketika kepala daerah yang baru sudah terpilih dan membantu meningkatkan dan mempertajam Strategi dan penggunaan Medium Kampanye secara Lebih Efektif (Determinasi).

Kemenangan fantastis pasangan dr. Herman Sutrisno-Akhmad Dimiyati, Sebagaimana diketahui, pasangan incumbent ini berhasil menyisihkan rivalnya dengan total raihan 92,13 persen suara sah. Total suara sah versi KPUD Banjar sebesar 95.893 pemilih. Dari hasil survey ini dapat diketahui beberapa indikator yang mempengaruhi munculnya kembali pejabat incumbent sebagai pemenang Pilkada Banjar tahun 2008, antara lain;

Pertama, Popularitas dr. Herman sebagai pejabat Walikota Banjar belum tersaingi oleh calon-calon walikota lainnya. Salah satu indikator pemimpin mendapat dukungan rakyat adalah *popularity* (populer), tidak dapat dipungkiri *incumbent* memperoleh keuntungan sangat besar untuk meraih popularitas, karena selama lima tahun ia memegang kendali pemerintahan, menata pembangunan serta memfasilitasi pelayanan publik. Implikasinya *incumbent* dikenal luas oleh rakyatnya. Kepopuleran *incumbent* bertambah besar, jika program yang didesainnya benar-benar merupakan kebutuhan riil dan hasilnya benar-benar dirasakan serta dinikmati masyarakat. Aspek popularitas menunjukkan publik lebih merasa yakin memilih *incumbent* yang jelas-jelas sudah lebih berpengalaman mengatur kendali pemerintahan sebelumnya.

Dalam konteks Banjar, keunggulan dr Herman Sutrisno dalam survey membuktikan bahwa secara figuritas dr Herman memang sangat populer di kalangan masyarakat Banjar. Menurut Riswandha Imawan (Suara Merdeka, 15 Juni 2005) sistem pemilihan langsung akan membuat keterkaitan ke partai (*party attachment*) melemah, beralih pada keterikatan ke individu (*personal attachment*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa popularitas individu seorang calon akan lebih didominasi pengaruhnya dibandingkan dengan peran partai politik sebagai mesin politiknya.

Kedua, dr. Herman Sutrisno lebih mengenal karakter masyarakat Banjar dan lebih menguasai medan. Figur *incumbent* tentunya sudah menguasai secara jelas suatu kondisi daerah. Seperti halnya dalam menghadapi Pilkada, *incumbent* sudah punya persiapan yang sudah cukup maksimal. Sebaliknya lawan-lawan *incumbent*, akan ketinggalan jauh dari *incumbent* dalam kompetisi Pilkada di daerah tersebut. Demikian pula dalam menggalang dukungan, *incumbent* tidak begitu perlu bekerja keras, karena sudah mengenal secara komprehensif individu dan elemen masyarakat yang akan diajaknya untuk berhimpun mendukungnya.

Ketiga, pencitraan dr Herman Sutrisno lebih kuat melalui komunikasi yang lebih sering dengan masyarakat, terutama ketika Walikota melakukan *direct communication* (komunikasi langsung) dengan publik. Pada hakekatnya komunikasi bertujuan untuk membangun kebersamaan. *Incumbent* jauh-jauh hari (5 tahun) sudah melakukan komunikasi dengan publiknya. Hampir setiap waktu, komunikasi terjadi baik secara individual, kelompok maupun dengan massa yang lebih besar. Komunikasi langsung yang dilakukan makin melekat dan meraih simpati publik, bila terjalin *double way traffic communication* (komunikasi dua arah/ timbal balik) artinya *incumbent* bukan hanya menjelaskan program pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya akan tetapi ia juga menerapkan asas responsifitas (daya tanggap) yaitu menerima umpan balik (*feed back*) berupa aspirasi, keluhan, saran, masukan, termasuk juga kritik.

Keempat, Figur dr Herman sebagai pejabat *incumbent* lebih mendapat kepercayaan rakyat. Seorang pejabat yang bisa melanggengkan kekuasaannya kembali, merupakan bukti nyata, rakyat yakin dan percaya atas kemampuan mereka. Walaupun berbagai macam serangan yang ditujukan untuk merusak kredibilitasnya, masyarakat secara langsung tetap menjatuhkan pilihannya di bilik suara tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun. Pilkada yang

bertujuan untuk pembelajaran berdemokrasi, telah dimanfaatkan rakyat dengan hati nurani dan rasional. Banyaknya *incumbent* terpilih kembali di pucuk pimpinan pemerintahan memberikan makna kapabilitas, akseptabilitas, kredibilitas, dan integrasi.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian (*survei*) yang dilakukan ada beberapa karakteristik perilaku pemilih masyarakat Banjar terhadap figuritas calon atau bahkan calon walikota Banjar, namun yang digunakan dalam penelitian ini Sebab, yang dipakai adalah kriteria popularitas atau kedikenalan. Terkenal (*famous*) berbeda dengan kriteria diterima (*acceptability*) serta keterpilihan (*electability*), Berdasarkan pada hasil analisis di atas penelitian survei ini menyimpulkan sebagai berikut :

Antusiasme dan animo masyarakat terhadap Pilkada langsung di Kota Banjar sangat besar. Aspirasi masyarakat Banjar terhadap Pilkada langsung di Kota Banjar meliputi karakteristik individual figur, yaitu integritas, kemampuan ekonomi, komitmen untuk memajukan daerah dan kapabilitas kepemimpinan selain yang lebih penting juga popularitas calon.

Pejabat *Incumbent* untuk sementara masih mendapatkan perhatian yang paling besar dari masyarakat, disebabkan beberapa indikator yang dapat di lihat misalnya, tingginya popularitas figur, intensitas komunikasi dengan masyarakat baik melalui *direct communication* (komunikasi langsung) maupun *indirect communication* (komunikasi tidak langsung), penguasaan medan dalam arti seorang calon memahami situasi dan kondisi masyarakatnya, kemudian kepercayaan dari masyarakat juga menjadi poin yang sangat penting ..

Figur walikota yang di idolakan masyarakat Kota Banjar adalah figur yang berlatarbelakang putra daerah, mempunyai kemampuan ekonomi yang baik serta mempunyai visi yang jelas terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banjar.

Berdasarkan survey yang dilakukan maka untuk sementara kandidat terkuat calon Walikota Banjar masih di pegang oleh pejabat *incumbent* yaitu dr. Herman Sutrisno.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan A.Zainal Basri, 2005. *Pilkada langsung, Problem dan Prospek : Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Budiharjo, Prof. Miriam. 1980. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. P.T. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Gaffar, Affan. 2002. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Utama.
- Mattehew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* . Tjetjep Rohendi Rohidi (penerjemah) Qualitative DA. UI Press. Jakarta.
- Rudianto, Bambang. *Social Mapping: Metode Pemetaan Sosial , Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti*. Rekayasa Sains. Jakarta.
- Roth, Dieter. 2008. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-Teori dan Metode. Lembaga Survei Indonesia*. Jakarta.
- Venus Antar. 2007. *Manajemen Kampanye : Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung

SUMBER LAIN :

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Bappeda Kota Banjar. 2005. *Banjar Dalam Angka*. Kota Banjar